

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang dapat dimaknai sebagai wadah untuk menuju pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah harus lebih memahami situasi dan kondisi segala sumber daya yang ada di sekolah sehingga apa yang menjadi kelebihan sekolah dapat lebih dikembangkan dan apa yang mejadi kelemahan dari sekolah dapat dikendalikan dengan baik. Di era globalisasi ini, telah banyak sekolah yang telah menerapkan model Manajemen Berbasis Sekolah. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu model yang menitiberatkan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di sekolah dan diatur oleh sekolah itu sendiri, sehingganya sekolah memegang peranan utama dalam mengambil suatu kebijakan demi kemajuan sekolah.

MBS tidak diartikan secara dangkal dalam otonomi sekolah pada pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah, tetapi lebih ke strategi sekolah khususnya kepala sekolah dan guru atau warga sekolah dalam mengelola bidang yang terkait dengan subtansi manajemen khususnya manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan sekolah dan masyarakat, serta layanan khusus. Semua aspek dan delapan (8) standar pendidikan dapat terpenuhi dengan baik jika kepala sekolah dan guru mampu melaksanakan manajemen sekolah secara efektif dan efisien. Karena, sebaik-baiknya sekolah adalah sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dipandang perlu dan mendesak, sejalan dengan tuntutan masyarakat agar lembaga pendidikan persekolahan dapat dikelola secara lebih demokratis dibandingkan dengan pola kerja yang dipandu dari atas. Prakarsa menuju perbaikan mutu ini tergantung dari bagaimana warga sekolah termasuk masyarakat dapat saling bekerja sama menciptakan perubahan yang sesungguhnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Danim (2012:16) bahwa, “ tidak ada sekolah yang mampu menjadi wahana pembelajaran yang baik kecuali berkinerja baik, dan tidak ada sekolah yang berkinerja baik, kecuali dikelola secara profesional oleh kepala sekolah dan semua komunitasnya”. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa dalam penerapan manajemen berbasis sekolah kepala sekolah dan semua sifitas akademik harus saling bekerja sama dalam mengembangkan sekolah.

Penerapan MBS ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1, bahwa pengelolaan satuan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Sejalan dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Selain itu, telah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 49 ayat 1 dalam

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi : (1) kemandirian, (2) keadilan, (3) keterbukaan, (4) kemitraan, (5) partisipatif, (6) efisiensi, dan (7) akuntabilitas (P4 KEA). (Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, 2013:17).

Kemandirian merupakan prinsip utama dalam mengelola setiap elemen yang menjadi cakupan dalam MBS. Maka, sekolah harus benar-benar mampu mengambil tindakan yang tepat. Kewenangan ataupun otonomi yang diberikan pada sekolah karena diakui mampu mengelola sekolah secara baik dan benar. Mandiri bukan berarti semuanya dikerjakan oleh kepala sekolah dan guru, melainkan kepala sekolah juga harus mampu membangkitkan semangat warga sekolah dan *stakeholder* lainnya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membangun sekolah kearah yang lebih maju. Selain itu, sekolah akan lebih nampak penerapan MBS nya jika kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya mampu mengefesiensikan segala sesuatu yang berada dilingkungan sekolah untuk kepentingan peserta didik.

Mengelola sekolah secara mandiri kadang banyak menimbulkan persepsi-persepsi negatif dari kalangan masyarakat apalagi jika itu berhubungan dengan dana. Karena, pada setiap cakupan pilar pendidikan pasti akan membutuhkan dana. Khususnya sarana dan prasarana. Ini semua harus difikirkan secara matang. Hal tersebut pasti akan dituntut keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana sehingga tidak terjadi kesalah pahaman baik antar warga sekolah maupun antar sekolah dengan masyarakat yang dalam hal ini orang tua

siswa. Selain itu, MBS sendiri tidak jauh dari bagaimana sekolah mampu membangun hubungan dengan masyarakat ataupun *stakeholder* lainnya. Dalam menciptakan kemitraan yang baik kepala sekolah harus adil dalam memperlakukan semua warga sekolahnya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jika semua prinsip ini dijalankan dengan baik maka suatu hal yang tidak mungkin sekolah itu tidak berhasil dalam mencapai tujuannya.

Efektivitas penerapan manajemen berbasis sekolah ini, dinilai berhasil jika prinsip-prinsip MBS itu sendiri dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena, dengan prinsip tersebut akan mengarahkan sekolah atau khususnya warga sekolah untuk tetap fokus pada tujuan ataupun alasan dari penerapan MBS. Berdasarkan prinsip MBS tersebut diartikan bahwa sekolah harus dikelola oleh warga sekolah dengan ketentuan harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara ataupun kreatifitas dari warga sekolah itu sendiri. Sekolah juga diberikan kebebasan serta ruang dalam mengembangkan ide secara mandiri dengan berlandaskan kerja sama yang kuat antar warga sekolah dan *stakeholder*. Karena, kerja sama yang kuat merupakan objek terpenting pada efektivitas suatu organisasi. Suatu kegiatan dapat berjalan jika ada orang-orang yang secara bersama menggerakkan organisasi tersebut, begitu pula dalam organisasi sekolah. Sekolah dapat diketahui keberadaannya jika ada warga sekolahnya yang memang terlihat nyata menggerakkan organisasi yang dibuktikan dengan prestasi-prestasi dari sekolah tersebut dan ini semua harus dikelola sebaik mungkin.

Pada observasi awal di SD Negeri 30 Kota Selatan, sesuai wawancara yang dilakukan bersama Kepala Sekolah SD Negeri 30 Kota Selatan Kota

Gorontalo bahwa sekolah tersebut telah menerapkan MBS namun, masih terdapat beberapa prinsip yang belum sepenuhnya benar-benar efektif. Dari wawancara singkat ini, menandakan bahwa MBS tidak bisa dinilai secara parsial, melainkan harus dilihat lebih jauh bagaimana sekolah tersebut mampu menerapkan secara keseluruhan mulai dari *input*, proses dan *output* nya serta mampu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Karena, salah satu harapan dalam penerapan MBS itu sendiri yaitu dapat merubah paradigma yang selalu melihat pada hasil akhir atau *output*. Atas dasar pemikiran inilah penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengkaji masalah tersebut secara sistematis dalam formulasi judul ***“Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 30 kota Selatan Kota Gorontalo”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kemandirian di SD Negeri 30 Kota Selatan ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip keadilan di SD Negeri 30 Kota Selatan ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kemitraan di SD Negeri 30 Kota Selatan?
4. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip keterbukaan di SD Negeri 30 Kota Selatan ?

5. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip partisipatif di SD Negeri 30 Kota Selatan ?
6. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip efisiensi di SD Negeri 30 Kota Selatan ?
7. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas di SD Negeri 30 Kota Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip kemandirian di SD Negeri 30 Kota Selatan.
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip keadilan di SD Negeri 30 Kota Selatan.
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip kemitraan di SD Negeri 30 Kota Selatan.
4. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip keterbukaan di SD Negeri 30 Kota Selatan.
5. Untuk mengetahui gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip partisipatif di SD Negeri 30 Kota Selatan.
6. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip efisiensi di SD Negeri 30 Kota Selatan.
7. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas di SD Negeri 30 Kota Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendidikan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan prinsip MBS di SD Negeri 30 Kota Selatan kota Gorontalo.
2. Bagi Kepala Sekolah: diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan secara kontekstual dan konseptual dalam merumuskan pola pengembangan prinsip MBS yang lebih baik lagi.
3. Bagi Guru: diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah demi kemajuan pendidikan.
4. Bagi peneliti berikutnya: diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dimasa mendatang.